



Diplomasi oleh Pemerintah Kota: Dinamika Kerja Sama Kota Kembar antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Liuzhou

Tiara Galuh Saraswati, Reni Windiani, Fendy Eko Wahyudi

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Bandung city government has legality as a sub-state actor in carrying out foreign cooperation. Currently, Bandung has fifteen partners in the city of sister city cooperation and one of them is Liuzhou City. Although it has been established for 15 years, several areas of cooperation have not yet been implemented. In addition, this cooperation has been in a vacuum for seven years. With this background, this research aims to determine why this cooperation did not run smoothly. This research uses qualitative methods with sources obtained from official documents and interviews. The result of this research is that cooperation does not run smoothly because three out of five key elements of cooperation between cities according to UNDP are not fulfilled. Which are commitment to link, community participation in the project, and reciprocity.

Keywords: *Sister City, Bandung City, Liuzhou City*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memberi legalitas kepada pemerintah daerah/kotanya untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain, yaitu pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri. Salah satu contoh kegiatan kerja sama daerah dengan pihak luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah/kota di Indonesia ialah kerja sama kota kembar atau *sister city*. Kerja sama kota kembar ini diartikan sebagai kerja sama jangka panjang yang melibatkan dua kota atau lebih, yang mana kerja sama ini ditujukan untuk saling mendapatkan keuntungan bagi para pihak (Franco & Marmelo, 2014). Beberapa kota besar di Indonesia telah melakukan kerja sama ini, salah satunya ialah Kota Bandung yang telah melakukan kerja sama kota kembar sejak tahun 1960 dengan Kota Braunschweig (Humas Kota Bandung, 2019). Hingga saat ini, Pemerintah Kota Bandung telah memiliki lima belas mitra kerja sama kota kembar. Salah satunya ialah Kota Liuzhou, kota industri terbesar di Provinsi Guangxi Republik Rakyat Tiongkok (Bagian Kerja Sama Kota Bandung, n.d.).

Ketika melaksanakan kerja sama dengan Kota Liuzhou, Pemerintah Kota Bandung berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai tahapan yang harus dilalui sebelum kerja sama. Tahap awal dari proses

kerja sama antara Kota Bandung dan Kota Liuzhou diawali dengan diterimanya surat dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou mengenai Rencana Kunjungan Wakil Walikota Liuzhou ke Kota Bandung pada tanggal 5 Maret 2004. Perwakilan dari Kota Liuzhou kemudian tiba di Kota Bandung pada tanggal 31 Maret—1 April 2004. Perwakilan tersebut antara lain Li Xuxiang selaku Wakil Walikota Liuzhou, Bai Weixing, Gao Pu, dan Zhang Xiazhong (Bagian Kerja Sama Pemerintah Kota Bandung, 2016).

Adapun tujuan dari kunjungan ini ialah hendak menjadikan Kota Bandung sebagai mitra Kota Liuzhou dalam lingkup kerja sama kota kembar. Setelah dilakukan kunjungan balasan oleh Pemerintah Kota Bandung, dilakukan perundingan mengenai pembahasan rencana kerja sama. Dalam perundingan tersebut, kedua kota saling mengkaji potensi masing-masing daerah agar dapat menentukan langkah selanjutnya. Sektor pariwisata yang ada di Kota Bandung dinilai memiliki nilai kompetitif oleh para pengusaha dari Kota Liuzhou. Beberapa pengusaha siap untuk menanamkan investasinya di bidang perhotelan untuk mendukung pariwisata di Kota Bandung. Hal ini berkat dorongan para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia Komite Tiongkok. Sama halnya dengan Kota Liuzhou, Kota Bandung melihat adanya kemiripan potensi, dan budaya, antara kedua nya sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan kerja sama di bidang-bidang pembangunan (Bagian Kerja Sama Pemerintah Kota Bandung, 2016).

Pada tanggal 21 September 2006, Dada Rosada dan Wen Hequn menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) Kota Bersaudara. Kedua kota bersepakat untuk bekerja sama di bidang: (1) Ekonomi, Perdagangan, Industri, dan Pariwisata; (2) Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Administrasi; (3) Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Pemuda, dan Olahraga; (4) Lingkungan Hidup, Kependudukan, dan Pembangunan Perkotaan; (5) Bidang-bidang lain yang akan disetujui oleh kedua pemerintah kota. Dalam pengimplementasiannya, kerja sama ini tidak berjalan lancar. Disebutkan dalam MoU bahwa akan dibentuk Kelompok Kerja Bersama guna menyiapkan dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah serta bertemu setiap tahunnya untuk membahas kegiatan tersebut. Akan tetapi, hingga saat ini Kelompok Kerja Bersama belum terbentuk. Dalam rangkaian kegiatan implementasi kerja sama pula, terdapat beberapa bidang yang telah disepakati untuk bekerja sama tetapi belum dilaksanakan dan kegiatan kerja sama sempat terhenti selama beberapa tahun. Setelah kegiatan pada tahun 2011, kerja sama ini vakum selama 7 tahun. Kegiatan kerja sama kedua kota baru kembali dilaksanakan pada tahun 2018—2020 (Bagian Kerja Sama Kota Bandung, 2022).

Terdapat beberapa penelitian mengenai kerja sama kota kembar Kota Bandung. Fahri (2018) meneliti mengenai kerja sama Kota Bandung dengan Kota Braunschweig yang telah melakukan berbagai program kerja dalam pengimplementasian kerja sama. Akan tetapi, masyarakat kota kurang berpartisipasi untuk mendukung jalannya kegiatan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Alam dan Sudirman (2020) yang meneliti mengenai kerja sama Kota Bandung dengan Kota Suwon dan Braunschweig. Hasil penelitiannya ialah Pemerintah Kota Bandung berupaya untuk meningkatkan sektor perekonomian kota dengan menarik investor asing serta menciptakan peluang untuk meningkatkan

ekspor. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Adinda, Bainus, dan Riswanda (2020). Penelitian ini meneliti mengenai kerja sama kota kembar yang dilakukan oleh Kota Bandung dengan Kota Seoul yang pada awalnya berjalan aktif tetapi kemudian berhenti di tengah jalan pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana kerja sama kota kembar Kota Bandung dengan kota mitranya, yaitu Kota Braunschweig, Kota Suwon, dan Kota Seoul. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada kerja sama kota kembar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung, Indonesia dengan Kota Liuzhou, Tiongkok. Dari ketiga kota di Tiongkok yang bekerja sama dengan Kota Bandung, kerja sama dengan Kota Liuzhou ini lebih aktif dibandingkan dengan kota lainnya. Akan tetapi, dalam perjalanannya, kerja sama ini tidak selalu berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penelitian ini khususnya menggali hal-hal apa saja yang membuat kerja sama ini tidak berjalan lancar. Disebutkan dalam MoU bahwa akan dibentuk suatu kelompok Kerja Bersama guna menyiapkan dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah serta bertemu setiap tahunnya untuk membahas kegiatan tersebut. Namun, hingga saat ini kelompok tersebut tidak pernah terbentuk (Mugia, 2022). Dalam rangkaian kegiatan kerja sama pun kerja sama ini sempat vakum selama beberapa tahun, yakni setelah kegiatan pada tahun 2011, kerja sama ini vakum selama 7 tahun. Setelah melakukan kegiatan pada tahun 2018—2020, kerja sama antara kedua ini kembali vakum pada tahun 2021 (Bagian Kerja Sama Bandung, 2022).

Untuk mengetahui alasan kerja sama ini tidak lancar, digunakan teori Paradiplomasi serta konsep *sister city* untuk menjadi panduan. Paradiplomasi menurut Panayotis Soldatos merupakan pelaksanaan hubungan luar negeri dengan pihak lain yang dilakukan oleh aktor Sub-State (Mukti, 2013). Pemerintah daerah yang diberi wewenang oleh Pemerintah pusat kemudian melakukan kerja sama dengan pihak luar negeri untuk membangun daerahnya sendiri. Kemudian kegiatan paradiplomasi ini dapat terlihat dalam kerangka kerja sama kota kembar atau *sister city*. Kerja sama ini merupakan hubungan kerja sama kota bersaudara yang dijalankan oleh pemerintah daerah di suatu negara, baik yang memiliki kedekatan secara geografis, berada di satu kawasan, maupun berbeda benua (Tavares, 2016). Dalam Konferensi PBB Ketiga tentang Negara-negara Terbelakang pada tahun 2001, Nigel Ringrose—seorang ahli dari UNDP (United Nations Development Programme)—mempresentasikan studi UNDP tentang “*The Challenges of Linking: C2C Cooperation as a Development Modality for the 21st Century*” (OHCHR, 2009).

Dalam studi tersebut disebutkan mengenai elemen-elemen kunci agar kerja sama antar kota dapat dikatakan berhasil, yakni (1) komitmen yang ditunjukkan oleh para pihak dalam hubungan kerja sama, (2) keterlibatan masyarakat dalam program kerja, (3) pemahaman bersama mengenai tujuan yang disepakati, (4) hubungan timbal balik antara kedua pihak, dan (5) hasil nyata dari implementasi kebijakan yang telah dilakukan (Tjandradewi & Marcotullio, 2009). Melalui studi UNDP tersebut, dibangun argumen penelitian bahwa kerja sama kedua kota tidak berjalan lancar disebabkan oleh tidak terpenuhinya beberapa elemen penting yang diperlukan dalam kerja sama daerah. Yakni elemen komitmen yang ditunjukkan

dalam kerja sama, melibatkan masyarakat dalam proses serta implementasi kerja sama, dan hubungan timbal balik para pihak.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif sehingga penelitian ini akan menjelaskan subjek penelitian, yakni mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kerja sama kota kembar antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Liuzhou tidak berjalan lancar. Penelitian ini dilakukan di Bagian Kerja Sama Kota Bandung yang beralamatkan di Jalan Aceh No. 51 Bandung. Serta data yang digunakan berupa dokumen dan hasil wawancara yang didapatkan melalui wawancara dengan pegawai Bagian Kerja Sama Kota Bandung serta dokumen-dokumen yang mendukung. Lalu, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, yakni teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2008). Data-data yang diperoleh didapat langsung dari narasumber yang bergerak di bidangnya sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya.

PEMBAHASAN

Dalam Konferensi PBB Ketiga tentang Negara-negara Terbelakang pada tahun 2001, Nigel Ringrose—seorang ahli dari UNDP (United Nations Development Programme)—mempresentasikan studi UNDP tentang “*The Challenges of Linking: C2C Cooperation as a Development Modality for the 21st Century*” (OHCHR, 2009). Dalam studinya, disebutkan mengenai elemen kunci yang membuat kerja sama antar kota dapat dikatakan berhasil. Dalam penelitian ini, elemen-elemen kunci tersebut digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang membuat kerja sama ini tidak berjalan lancar. Hasilnya ialah tidak terpenuhinya beberapa elemen penting yang diperlukan dalam kerja sama antarkota menurut UNDP dalam kerja sama ini. Yaitu elemen komitmen yang ditunjukkan dalam kerja sama, melibatkan masyarakat dalam proses serta implementasi kerja sama, dan hubungan timbal balik para pihak.

Komitmen yang Ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam Kerja Sama Kota Kembar dengan Kota Liuzhou

Komitmen yang ditunjukkan dalam kerja sama ini dapat terlihat dari bagaimana kedua kota mengerahkan sumber daya manusia (SDM) nya. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini ialah para aparat pemerintah kota, baik Kota Bandung maupun Kota Liuzhou. Aparat kedua pemerintah kota berperan sebagai penghubung untuk terus menjalin kerja sama dan menangani kegiatan kerja sama, seperti menyusun rencana kegiatan, mengatur pertemuan resmi, menggali potensi kerja sama, dan mengkoordinasi perkembangan kegiatan kerja sama. Tidak hanya SDM nya saja, tetapi juga dapat terlihat dari upaya, waktu, serta finansial yang dikerahkan (Tjandradewi & Marcotullio, 2009). Dalam kerja sama ini, Pemerintah Kota Bandung memiliki permasalahan internal terkait SDM nya. Dalam laporan tahunan ditegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki keterbatasan personil dalam menangani kerja sama yang dilakukan oleh Kota Bandung (Bagian Kerja Sama Kota Bandung, 2022). Pemerintah Kota Bandung memiliki empat pegawai subbagian Kerja Sama Luar Negeri sedangkan saat ini

Kota Bandung memiliki 31 kerja sama luar negeri dengan rincian: kerja sama dengan 12 lembaga asing, 15 kerja sama kota kembar, dan 4 kerja sama dengan negara lain. Dengan kondisi kerja sama luar negeri yang begitu banyak dan hanya memiliki 4 personil, aparat Bagian Kerja Sama Kota Bandung kekurangan sumber daya manusia untuk dapat mengeksplorasi potensi-potensi yang dapat digali dari kerja sama-kerja sama yang dilakukan oleh Kota Bandung. Selain itu, ketika kerja sama ini vakum, aparat Bagian Kerja Sama Bandung menerima disposisi dari pimpinan untuk mencari kerja sama baru untuk mendapatkan dana hibah dan investasi dari mitra kerja sama baru sehingga kerja sama yang telah ada terabaikan (Mugia, 2022). Namun demikian, Pemerintah Kota Bandung menunjukkan tanggung jawabnya dalam hal finansial dari implementasi kegiatan kerja sama. Hal ini ditunjukkan dalam laporan tahunan yang mengatakan bahwa porsi alokasi dana dari kedua pihak sudah sesuai dengan kesepakatan (Bagian Kerja Sama Kota Bandung, 2022).

Keterlibatan Masyarakat dalam Mendukung Kegiatan Implementasi Kerja Sama Kota Kembar

Keterlibatan masyarakat dalam implementasi kerja sama kota kembar dapat terlihat dari bagaimana Lembaga Swadaya Masyarakat (SDM) dan masyarakat kota bekerja sama dengan pemerintah kota. LSM dapat menyalurkan aspirasi dari masyarakat mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat kota, mengidentifikasi permasalahan kota bersama dengan pemerintah kota, hingga menemukan solusi bersama dari permasalahan yang telah diidentifikasi (Rochman & Hudalah, 2020). Dengan melibatkan masyarakatnya, pemerintah kota dapat menentukan program kerja yang tepat untuk pembangunan kota sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kerja sama kota kembar, baik saat merencanakan maupun melakukan program kerja, berpengaruh pada hasil kerja sama kedua kota. Banyaknya keterlibatan masyarakat, baik kelompok, organisasi, maupun sektor bisnis, dalam kerja sama kota kembar memperkuat hubungan yang mengarah pada kerja sama yang berkelanjutan (Hafteck, 2003).

Beberapa kerja sama kota kembar yang berbasis pada masyarakat yang berhasil ialah kerja sama kota kembar yang dilakukan oleh Kota Cape Town, Afrika Selatan dengan Kota Aachen, Jerman; Kota Honolulu, Hawaii dengan Kota Hue, Vietnam; dan kerja sama yang dilakukan oleh salah satu kota di Indonesia, yakni Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu, Jepang (Kurniawan et al., 2013; Rochman & Hudalah, 2020). Akan tetapi, dari hasil wawancara dengan Ibu Christine selaku pegawai Subbagian Kerja Sama Luar Negeri Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung hingga saat ini tidak melibatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan implementasi kerja sama ini. Alasannya ialah, Pemerintah Kota Bandung belum memiliki anggaran untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program kerja. Masyarakat Kota Bandung hanya sebatas menjadi partisipan dari kegiatan kerja sama yang diadakan. Meskipun begitu, Pemerintah Kota Bandung kurang menginformasikan kegiatan kerja sama kepada masyarakat,

komunitas, institusi pendidikan, dan pihak lain di luar instansi Pemerintah Kota Bandung (Bagian Kerja Sama Kota Bandung, 2022).

Pemahaman Bersama dari Kedua Pemerintah Kota mengenai Tujuan yang Telah Disepakati

Pemahaman bersama ini dapat tertuang dalam Nota Kesepahaman atau MoU. MoU merupakan langkah awal yang penting dalam menetapkan tujuan dan harapan yang jelas untuk kedua pihak sebelum memulai kerja sama (Tjandradewi & Marcotullio, 2009). Kedua pemerintah kota telah menandatangani MoU Kerja Sama Kota Bersaudara pada tanggal 21 September 2006 (Humas Kota Bandung, 2016). Kedua kota sepakat untuk menjalankan hubungan kerja sama yang sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keuntungan timbal balik, serta bekerja sama untuk mengembangkan dan memperluas pembangunan kedua kota dalam bidang ekonomi dan perdagangan, kebudayaan, pariwisata, lingkungan hidup, dan pendidikan.

Selain mencapai kesepakatan mengenai bidang kerja sama, kedua pihak pun menyepakati mengenai ketersediaan dana dan personil, dan sumber daya-sumber daya lainnya. Dalam MoU tertuang pula aturan-aturan yang ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan kerja sama. Aturan-aturan tersebut ialah kedua pihak sepakat untuk membentuk suatu kelompok yang bertugas untuk mempersiapkan dan mengusulkan kegiatan-kegiatan kedua kota, baik kegiatan jangka pendek maupun menengah. Kelompok tersebut juga direncanakan untuk bertemu setiap tahunnya secara bergantian di Kota Bandung atau Kota Liuzhou. Tujuan kerja sama dan jangka waktu dari kerja sama kota kembar kedua kota telah dinyatakan secara jelas dalam MoU yang telah disepakati. Jika kedua pihak memiliki perbedaan penafsiran ataupun dalam implementasi dari MoU ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara bersahabat melalui perundingan. Tidak ada batasan yang ketat dalam perjanjian yang telah disepakati ini yang membuat kerja sama kedua kota sangat fleksibel untuk diubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pihak yang berubah.

Interaksi Timbal Balik dari Kedua Pemerintah Kota dalam Pengimplementasian Kerja Sama Kota Kembar

Interaksi timbal balik yang dimaksud dalam hal ini ialah bagaimana kedua pihak saling memberikan manfaat untuk merealisasikan tujuan dari dilakukannya kerja sama ini (Tjandradewi & Marcotullio, 2009). Melalui hubungan ini, Pemerintah Kota Bandung berharap dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bandung untuk seluruh masyarakat Kota Bandung. Selama dilakukannya kerja sama, penerima manfaat dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan didominasi oleh Kota Bandung. Seperti misalnya, pada tahun 2020 silam melalui perusahaan PT. SGMW, kota Liuzhou memberi bantuan masker untuk Kota Bandung (Bagian Kerja Sama Kota Bandung, 2020). Dilansir dari laporan tahunan pula, hubungan kerja sama ini lebih menguntungkan bagi Kota Bandung. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa Pemerintah Kota Bandung merasa belum mampu untuk memberikan timbal balik untuk kota Liuzhou. Terbatasnya anggaran dana, belum memiliki kapasitas yang mumpuni, serta kondisi

perekonomian kota Liuzhou yang lebih baik dari Kota Bandung menjadi alasannya. Saat ini, aparat Bagian Kerja Sama Kota Bandung sedang mengupayakan untuk menemukan potensi apa yang dapat diberikan oleh Kota Bandung untuk Kota Liuzhou. Akan tetapi, pola pikir pimpinan saat ini masih berfokus pada keuntungan apa yang diterima oleh Kota Bandung dalam kerja sama ini, bukan hal apa yang dapat diberikan oleh Kota Bandung sebagai timbal balik.

Hasil Nyata yang Dirasakan oleh Kedua Pemerintah Kota dari Kerja Sama Kota Kembar

Agar tercapainya tujuan dari kerja sama, tentu dibutuhkan hasil yang nyata dari apa yang telah dilakukan selama berjalannya kerja sama. Hasil nyata ini dapat dirasakan secara tidak langsung dan langsung (Tjandradewi & Marcotullio, 2009). Kegiatan seperti komparasi bagi para pendidik, pertukaran pelajar, pengiriman staf dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk mempelajari pengembangan pertamanan, penandatanganan Kebun Binatang Kota Bandung dengan Kebun Binatang Kota Liuzhou untuk promosi pariwisata, pengiriman delegasi Liuzhou dalam BELIEF, pengiriman karya seni siswa SD Kota Bandung untuk *Friendly City Painting Exhibition*, dan ikut serta anak-anak Kota Bandung dalam lomba menyanyi lagu tradisional secara daring yang diselenggarakan oleh Kota Liuzhou memberikan hasil nyata secara tidak langsung. Akan tetapi, kegiatan-kegiatan seperti studi komparasi tenaga pengajar Kota Bandung, pertukaran pelajar, pengiriman staf dinas untuk mempelajari pengembangan pertamanan, dan promosi pariwisata penandatanganan kerja sama antara Kebun Binatang Kota Bandung dengan Kota Liuzhou dilaksanakan sebelum tahun 2011, peneliti tidak mampu mendapatkan laporan lebih lanjut mengenai dampak kegiatan tersebut terhadap Kota Bandung sebab Bagian Kerja Sama Kota Bandung baru dibentuk pada tahun 2013. Para aparat yang dahulu mengurus kerja sama ini sudah purnabakti sehingga peneliti tidak memiliki akses untuk mendapatkan data lebih lanjut.

Kegiatan lainnya, seperti kegiatan BELIEF yang diadakan oleh Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2018. Bagi Kota Bandung, kegiatan ini merupakan kesempatan untuk melebarkan sayapnya di dunia internasional. Lalu bagi para pemuda kota Liuzhou yang menghadiri kegiatan ini, menjadi wadah untuk mempelajari bidang kesehatan dan kepemimpinan (Rahmat, 2018). Lalu kegiatan *Friendly Cities Painting Exhibition* yang merupakan pameran seni yang diadakan oleh Kota Liuzhou pada Oktober 2019 lalu ini dapat memperdalam hubungan persahabatan mitra kota kembar nya dan memperkenalkan hasil karya anak-anak mitra kota kembar nya kepada warga kota Liuzhou (Springer, 2019). Pada bulan April 2022 pun kota Liuzhou mengadakan kegiatan lomba menyanyi yang pesertanya merupakan anak-anak dari mitra kota kembar. Melalui kegiatan ini, anak-anak Kota Bandung yang turut berpartisipasi memperkenalkan budaya tradisional kepada masyarakat Kota Liuzhou secara tidak langsung (Mugia, 2022).

KESIMPULAN

Dengan menggunakan indikator elemen kunci dari UNDP mengenai kerja sama antar kota, ditemukan beberapa permasalahan yang membuat kerja sama ini tidak berjalan dengan baik. Permasalahan tersebut ialah Pemerintah Kota Bandung

kurang menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kerja sama. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang berada di pemerintahan kota untuk mengurus kerja sama luar negeri. Aparat yang berperan untuk kerja sama luar negeri hanya terdapat 4 orang saja sedangkan kerja sama luar negeri yang dimiliki oleh Kota Bandung lebih dari 30 kerja sama. Kemudian, para aparat memiliki ruang gerak yang terbatas sebab mereka bergerak sesuai dengan disposisi pimpinan. Pada saat kerja sama kedua kota ini vakum, pimpinan pada saat itu menugaskan untuk berfokus pada menjalin kerja sama baru dengan pihak lain.

Permasalahan lainnya ialah tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses merencanakan implementasi kegiatan kerja sama. Dilibatkannya masyarakat dapat memberi sudut pandang baru bagi Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung juga akan mendapatkan pendapat masyarakat mengenai permasalahan-permasalahan kota yang dirasakan oleh masyarakat. Rencana-rencana kegiatan yang akan disusun pun menjadi lebih tepat sasaran karena menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Permasalahan terakhir dari indikator yang digunakan ialah tidak seimbangya interaksi timbal balik yang diberikan oleh Kota Bandung terhadap Kota Liuzhou. Selama berjalannya kerja sama, Kota Bandung hampir selalu menjadi penerima manfaat. Aparat Pemerintah Kota Bandung hingga saat ini belum menemukan potensi yang dimiliki oleh Kota Bandung dapat berguna untuk Kota Liuzhou. Hal ini disebabkan Kota Liuzhou, khususnya Negara Tiongkok, yang memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik dibandingkan dengan Kota Bandung. Selain itu, pola pikir yang dimiliki oleh pimpinan Pemerintah Kota Bandung saat ini ialah sejauh mana pihak lain dari kerja sama yang dilakukan Kota Bandung memberi keuntungan untuk Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, J. Q., Bainus, A., & Riswanda. (2020). Evaluasi Kerja Sama Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Sister Cities antara Kota Bandung dan Kota Seoul). *Jurnal Moderat*, 6(2), 350–360.
- Alam, G. N., & Sudirman, A. (2020). Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(1), 31–50. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3365.31-50>
- Bagian Kerja Sama Kota Bandung. (2020). *Pemkot Bandung Menerima Bantuan 10.000 Makser Dari Mitra Sister City, Liuzhou Melalui PT. SGMW (Wuling) Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19*. <http://kerjasama.bandung.go.id/2020/05/03/pemkot-bandung-menerima-bantuan-10-000-makser-dari-mitra-sister-city-liuzhou-melalui-pt-sgmw-wuling-untuk-penanggulangan-pandemi-covid-19>
- Bagian Kerja Sama Kota Bandung. (2022). *Laporan KSDPL KSDLL untuk Kementerian Dalam Negeri*.
- Bagian Kerjasama Kota Bandung. (2006). Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Liuzhou Propinsi Guang Xi, Republik Rakyat Cina Mengenai Kerjasama Kota Bersaudara.

- Fahri, M. (2018). *Dinamika Kerjasama Kota Bandung-Braunschweig dalam Kerangka Sister City*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Franco, M., & Marmelo, E. (2014). Sister-City Relationships As a Form of Inter-Organizational Cooperation: Exploratory Case Studies in the Portuguese Context. *Transylvanian Review*, 41, 75–89.
- Hafteck, P. (2003). An introduction to decentralized cooperation: Definitions, origins and conceptual mapping. *Public Administration and Development*, 23(4), 333–345. <https://doi.org/10.1002/pad.286>
- Humas Kota Bandung. (2016). *Kota Bandung Tandatangani Mou Sister City dengan Kota Yingkou dan Liuzhou RRC*. <https://www.bandung.go.id/news/read/157/kota-bandung-tandatangani-mou-sister-city-dengan-kota-yingkou-dan-liuzhou-rrc>
- Humas Kota Bandung. (2019). *Menuju 60 Tahun Sister City Bandung-Braunschweig*. <https://humas.bandung.go.id/layanan/menuju-60-tahun-sister-city-bandung-braunschweig>
- Mugia, Christine. (2022, Mei 11). Wawancara Sister City Bandung-Liuzhou. (T. Galuh, Pewawancara)
- Mukti, T. A. (2013). *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia* (Issue June). The Phinisi Press.
- OHCHR. (2009). *CITY-TO-CITY COOPERATION DISCUSSED AT 'MEETING OF MAYORS', PART OF BRUSSELS CONFERENCE ON LEAST DEVELOPED COUNTRIES*. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2009/10/city-city-cooperation-discussed-meeting-mayors-part-brussels-conference>
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama
- Rahmat, Y. (2018). *Belief, Diplomasi Aktif Promosikan Kota Bandung*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/311259/belief-diplomasi-aktif-promosikan-kota-bandung?video=>
- Rochman, G. P., & Hudalah, D. (2020). How does leadership factors spur the success of sister city cooperation? *Journal of Physics: Conference Series*, 1469(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1469/1/012032>
- Springer. (2019). *Springer Student Art Displayed in China*. <https://www.springer-id.org/2019/11/25/8/>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy: Cities and States as Global Prayers*. Oxford University Press.
- Tjandradewi, B. I., & Marcotullio, P. J. (2009). City-to-city networks: Asian perspectives on key elements and areas for success. *Habitat International*, 33(2), 165–172. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.10.021>